

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Mattabulu merupakan salah satu desa di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 151 km ke arah Utara Kota Makassar. Desa ini memiliki luas wilayah ± 54 km², berada pada ketinggian sekitar 1.070 mdpl, dengan jumlah penduduk sekitar 1.733 jiwa yang tersebar di dua dusun, yaitu Dusun Cirowali dan Dusun Teppoe (Kabupaten Soppeng Dalam Angka, 2025). Secara geografis, Mattabulu terletak di kawasan pegunungan dan berjarak sekitar 10 km dari pusat Kota Watansoppeng. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani kebun, yang memanfaatkan kondisi alam pegunungan sebagai sumber penghidupan utama.

Topografi Desa Mattabulu yang berada di pegunungan menyimpan kekayaan potensi yang mengantarkan desa ini menjadi terbaik 10 tingkat nasional lomba Desa Wisata Nusantara 2024 dan 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2024 (Kemenparekraf RI, 2024). Desa Mattabulu memiliki potensi alam yang beragam antara lain kopi, gula merah, dan madu hutan dengan cita rasa khas. Luas lahan kopi di Kecamatan Lalabata tercatat mencapai 125,00 Ha dengan produksi sebesar 23,95 Ton per tahun. Air nira diolah secara tradisional menjadi gula merah dan madu hutan dari Mattabulu dikenal memiliki kualitas alami yang tinggi (Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng, 2025).

Keragaman potensi alam di Desa Mattabulu juga menawarkan berbagai daya tarik wisata. Panorama objek wisata hutan pinus yang indah dan sejuk pada Hutan Pinus Lembah Cinta menawarkan sensasi menenangkan bagi pengunjung. Aliran deras Air Terjun Liu PangiE menjadi surga tersembunyi bagi wisatawan. Mattabulu unggul dari potensi wisata karena letaknya yang strategis dengan waktu tempuh 15 menit dari pusat Kota Watansoppeng Provinsi Sulawesi Selatan (Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng, 2025). Mattabulu juga dikenal dengan wisata religinya, yaitu makam dari Lapassari Andi Pawellori Syekh Muhammad Ali, pemimpin Kerajaan Soppeng Riaja dan penyebar agama Islam di wilayah Kabupaten Soppeng dan Barru (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, 2025).

Namun potensi tersebut mengalami hambatan serius akibat serangkaian bencana alam yang melanda Desa Mattabulu. Pada 3 November 2024 terjadi peristiwa pohon tumbang, yang kemudian disusul banjir bandang dan tanah longsor pada 22 Desember 2024. Bencana tersebut menutup akses utama menuju Kawasan Wisata Mattabulu dan menyebabkan aktivitas pariwisata terhenti. (BPBD Soppeng, 2024). Dampak yang ditimbulkan cukup signifikan, ditandai dengan penurunan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 83%, dari 5.660 kunjungan di Januari 2024 menjadi 955 kunjungan pada Desember 2024. Bahkan, sejak Januari 2025, aktivitas wisata di Desa Mattabulu dilaporkan berhenti secara total.

Berhentinya aktivitas wisata di Desa Mattabulu berdampak pada menurunnya pendapatan asli desa yang bersumber dari aktivitas wisata. Kondisi ini juga memengaruhi keberlangsungan UMKM lokal yang selama ini bergantung pada sektor pariwisata. Meskipun menyandang predikat sebagai desa wisata terbaik, pengelolaan UMKM di bawah naungan BUMDes Mattabulu dinilai belum optimal. Ketua BUMDes Mattabulu mengungkapkan bahwa dibutuhkan penguatan manajemen kelembagaan dan penguatan produk hasil UMKM Mattabulu, yaitu madu, gula merah, dan kopi agar mampu meningkatkan nilai jual dengan melakukan hilirisasi dan diversifikasi produk ekonomi lokal di Desa Mattabulu.

Menanggapi situasi tersebut, tim PPK Ormawa UKM Keilmuan dan Penalaran Ilmiah (KPI) Universitas Hasanuddin berkolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat Mattabulu merancang program pemberdayaan bernama “Sipatokkong”, yang dalam bahasa Bugis berarti “saling menopang untuk bangkit bersama”. Program ini mengusung pendekatan *Collaborative Governance* yang diperkuat dengan nilai bugis Eppa Sulapa yaitu Macca (cerdas), Malempu (jujur), Warani (berani), dan Getteng (tangguh).

Melalui pendekatan tersebut, masyarakat desa diharapkan dapat membangun kembali ekosistem wisata secara kolaboratif dengan berbagai pihak. Program Sipatokkong terdiri atas enam pilar kegiatan, yaitu:

1. Sipatokkong RibitaraE (bangkit dalam kebijaksanaan) merupakan solusi untuk penguatan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata dengan manajemen dan perencanaan kerja yang terukur.
2. Sipatokkong RidecengngE (bangkit dalam kebaikan) merupakan solusi peningkatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata yang dilakukan guna memberdayakan pengelola Wisata Mattabulu.
3. Sipatokkong MarajaE (bangkit dalam kejayaan) merupakan solusi untuk mengaktifkan kembali Desa Wisata Mattabulu melalui branding “Jelling (Journey along the pearls of Indonesia)”.
4. Sipatokkong RitongengngE (bangkit dalam kebenaran) merupakan solusi untuk mendesain sarana dan prasarana objek wisata yang informatif dan nyaman bagi wisatawan.
5. Sipatokkong RiminasaE (bangkit dalam harapan) merupakan solusi pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan yang akan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam hasil desa.
6. Sipatokkong RimatajangE (bangkit dalam kemuliaan) merupakan solusi penguatan mitigasi bencana sebagai upaya preventif pariwisata berkelanjutan.

Program ini bertujuan untuk memulihkan fungsi kelembagaan desa wisata, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesiapsiagaan bencana melalui kolaborasi multi-sektor yang partisipatif. Upaya revitalisasi kawasan wisata Mattabulu melalui program Sipatokkong diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat daya tahan sosial pasca bencana. Dengan demikian, program ini tidak hanya

berorientasi pada pemulihan jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan sistem pengelolaan wisata yang berkelanjutan dan adaptif.

Relevansi program ini semakin kuat karena sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Program Sipatokkong mendukung Asta Cita Pemerintah Indonesia poin ketiga, yaitu peningkatan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, dan pengembangan industri kreatif, serta program prioritas nasional poin ke-14 mengenai pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, program ini turut berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-8 (*Decent Work and Economic Growth*) dan poin ke-11 (*Sustainable Cities and Communities*). Kesesuaian tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi Desa Mattabulu memiliki dimensi strategis baik pada level lokal maupun nasional.

Namun demikian, revitalisasi kawasan wisata pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pemulihan infrastruktur, kelembagaan, dan ekonomi. Revitalisasi juga menyangkut proses rekonstruksi identitas dan citra destinasi, terutama pada desa wisata yang memiliki basis budaya dan religi yang kuat. Dalam konteks ini, penguatan narasi sejarah dan dokumentasi kultural menjadi elemen penting dalam membangun legitimasi, daya tarik, dan keberlanjutan destinasi wisata. Narasi yang terdokumentasi secara sistematis tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian nilai, transmisi sejarah lokal, dan pembentukan identitas kolektif masyarakat desa.

Atas dasar pemikiran tersebut, pendekatan revitalisasi yang komprehensif perlu mencakup dimensi literasi dan produksi teks sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis budaya. Dalam kerangka inilah keterlibatan disiplin ilmu humaniora menjadi relevan. Sebagai mahasiswa Program Studi Sastra Arab, kontribusi penulis dalam Program Sipatokkong tidak hanya terbatas pada pendampingan kelembagaan, tetapi juga pada produksi narasi budaya melalui penulisan artikel sejarah dan profil situs religi Petta Bulu Matanre. Kegiatan tersebut merupakan bentuk dokumentasi budaya berbasis literasi yang berkontribusi dalam memperkuat identitas wisata religi Desa Mattabulu. Oleh karena itu, revitalisasi kawasan wisata tidak hanya dilakukan melalui pendekatan ekonomi dan tata kelola, tetapi juga melalui revitalisasi narasi dan representasi budaya lokal. Integrasi antara pendekatan tata kelola kolaboratif dan penguatan narasi budaya inilah yang menjadi karakter khas Program Sipatokkong.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi pengelolaan pariwisata Mattabulu pasca bencana, menganalisis penerapan model *Collaborative Governance* yang diperkuat nilai Eppa Sulapa dalam revitalisasi kawasan wisata, menilai dampaknya terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dan keberlanjutan ekonomi hijau di Desa Mattabulu. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti peran literasi dan produksi narasi budaya dalam memperkuat identitas wisata lokal, khususnya melalui dokumentasi sejarah dan penulisan profil situs religi Petta Bulu Matanre sebagai bagian dari penguatan wisata religi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pengelolaan kawasan wisata di Desa Mattabulu pasca bencana?
2. Bagaimana penerapan pendekatan *Collaborative Governance Eppa Sulapa* dalam program Sipatokkong sebagai upaya revitalisasi kawasan wisata Mattabulu?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan program Sipatokkong terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, keberlanjutan ekonomi hijau, serta penguatan identitas budaya melalui produksi narasi wisata dan dokumentasi sejarah lokal di Desa Mattabulu?

1.3 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mengetahui dan menganalisis implementasi program Sipatokkong sebagai upaya revitalisasi kawasan wisata Mattabulu melalui pendekatan *Collaborative Governance Eppa Sulapa* dalam mendukung penguatan ekonomi hijau dan pariwisata berkelanjutan pasca bencana, serta penguatan identitas budaya melalui produksi narasi wisata dan dokumentasi sejarah lokal pasca bencana.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan kondisi kelembagaan dan pengelolaan wisata di Desa Mattabulu pasca bencana.
2. Menganalisis penerapan model *Collaborative Governance Eppa Sulapa* dalam pelaksanaan program Sipatokkong di Desa Mattabulu.
3. Mengevaluasi dampak pelaksanaan program Sipatokkong terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dan penguatan ekonomi hijau, serta penguatan identitas budaya melalui produksi narasi wisata dan dokumentasi sejarah lokal di Desa Mattabulu di Desa Mattabulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Bagi Masyarakat Desa Mattabulu

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Mattabulu dalam meningkatkan kemampuan mengelola potensi wisata lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui hasil penelitian ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya ekonomi hijau, inovasi produk lokal, serta kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penguatan narasi wisata religi guna mendukung keberlanjutan wisata desa.

1.4.2 Manfaat Bagi Pemerintah Desa

Bagi pemerintah desa, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pengembangan pariwisata berbasis kolaborasi dan kearifan lokal. Temuan penelitian ini diharapkan membantu pemerintah desa memperkuat kelembagaan Pokdarwis dan

BUMDes, merancang strategi pembangunan yang berorientasi pada ketahanan ekonomi dan lingkungan, serta mendukung dokumentasi dan promosi sejarah lokal.

1.4.3 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan referensi bagi akademisi, organisasi mahasiswa, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan model pemberdayaan masyarakat dan kebijakan pariwisata berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan dasar bagi program revitalisasi desa wisata di wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa, khususnya dalam mengintegrasikan penguatan ekonomi, tata kelola kolaboratif, dan produksi narasi budaya berbasis sejarah lokal.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Desa Wisata

Desa wisata merupakan bentuk pengembangan pariwisata berbasis pedesaan yang memanfaatkan potensi alam, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat sebagai daya tarik utama wisata (Lane & Kastenholz, 2023). Dalam praktiknya, desa wisata berkembang sebagai alternatif terhadap pariwisata massal yang kurang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal serta berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi (UNWTO, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa desa wisata yang dikelola secara partisipatif mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi desa (Astuti et al., 2021). Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan desa wisata sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dan tata kelola yang berkelanjutan.

Pengembangan desa wisata juga dipandang sebagai strategi diversifikasi ekonomi pedesaan melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha mikro berbasis potensi lokal (Putra et al., 2022). Wahyuni dan Suryani (2023) menekankan bahwa sektor kuliner, kerajinan, dan jasa wisata menjadi penggerak utama ekonomi lokal dalam desa wisata. Temuan tersebut diperkuat oleh Sidiq dan Resnawaty (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi aktif masyarakat berperan penting dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan desa wisata. Dengan demikian, desa wisata tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat pedesaan.

1.5.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok agar mampu mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mengendalikan arah pembangunan yang berdampak pada kehidupan mereka (Suharto, 2021). Dalam konteks desa wisata, pemberdayaan masyarakat menempatkan warga desa sebagai pelaku utama dalam pengelolaan

pariwisata sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pengambil peran strategis dalam pembangunan destinasi wisata. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pemberdayaan ini berkontribusi pada terciptanya kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan melalui pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan (Putra et al., 2022).

Pemberdayaan masyarakat dalam desa wisata diwujudkan melalui partisipasi aktif warga dalam perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi kegiatan pariwisata (Astuti et al., 2021). Partisipasi tersebut mendorong rasa memiliki terhadap desa wisata sehingga meningkatkan komitmen masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan, pelayanan, dan keberlanjutan destinasi. Tingkat partisipasi yang tinggi juga berperan dalam memperkuat ketahanan sosial dan kelembagaan desa wisata (Sidiq & Resnawaty, 2021).

Selain partisipasi, pemberdayaan masyarakat mencakup peningkatan keterampilan, pengetahuan, serta akses terhadap modal dan peluang usaha pariwisata (Suharto, 2021). Pelatihan pengelolaan usaha wisata dan penguatan literasi digital menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat desa wisata. Pemberdayaan yang berjalan efektif memungkinkan masyarakat memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam rantai nilai pariwisata dan mendukung keberlanjutan pengelolaan desa wisata (UNWTO, 2020).

1.5.3 **Collaborative Governance**

Collaborative governance merupakan pendekatan tata kelola yang menekankan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan publik melalui mekanisme dialog, kepercayaan, dan pembagian peran yang setara antar aktor (Ansell & Gash, 2008). Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan model pengelolaan yang bersifat *top-down*, khususnya dalam konteks pembangunan yang melibatkan banyak kepentingan dan aktor, termasuk sektor pariwisata (Emerson et al., 2012).

Dalam pengembangan desa wisata, *collaborative governance* memungkinkan terbangunnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan pihak lain yang berkepentingan dalam pengelolaan destinasi wisata. Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah berperan sebagai fasilitator kebijakan, masyarakat sebagai pengelola utama, serta sektor swasta sebagai pendukung pengembangan dan pemasaran destinasi, sehingga keterbatasan sumber daya dan kapasitas di tingkat lokal dapat diatasi secara bersama (Pratiwi & Kurniawan, 2024).

Penerapan *collaborative governance* juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola desa wisata melalui proses pengambilan keputusan yang lebih terbuka, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Pendekatan kolaboratif ini dinilai

mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan pengelolaan desa wisata dalam jangka panjang (Lane & Kastenholz, 2023).

1.5.4 Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau merupakan paradigma pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan dengan menjadikan efisiensi sumber daya serta pengurangan dampak lingkungan sebagai prinsip utama pembangunan (UNEP, 2021). Paradigma ini menjadi semakin relevan dalam sektor pariwisata yang sangat bergantung pada kualitas lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam sebagai daya tarik utama (OECD, 2022).

Dalam konteks desa wisata, penerapan ekonomi hijau diwujudkan melalui pengelolaan destinasi yang ramah lingkungan dan berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Praktik tersebut mencakup pengelolaan limbah, konservasi lingkungan, serta penggunaan teknologi dan energi yang lebih ramah lingkungan dalam aktivitas pariwisata, sehingga mendukung keberlanjutan ekonomi dan ekologis desa wisata (Wahyuni & Suryani, 2023).

Penerapan prinsip ekonomi hijau juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing desa wisata di tengah meningkatnya kesadaran wisatawan terhadap isu keberlanjutan. Wisatawan cenderung memilih destinasi yang memperhatikan aspek lingkungan dan tanggung jawab sosial, sehingga ekonomi hijau menjadi strategi penting dalam pengembangan desa wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing (Lane & Kastenholz, 2023).

1.5.5 Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan pariwisata yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan tujuan memastikan pemanfaatan sumber daya secara bertanggung jawab bagi generasi sekarang dan mendatang (UNWTO, 2020). Konsep ini menjadi landasan penting dalam pengembangan desa wisata karena aktivitas pariwisata sangat bergantung pada kelestarian sumber daya alam dan budaya lokal sebagai daya tarik utama (Lane & Kastenholz, 2023).

Dalam kerangka pariwisata berkelanjutan, aspek ekonomi diarahkan pada pemerataan manfaat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, sementara aspek sosial menitikberatkan pada pelestarian budaya serta penguatan identitas komunitas setempat. Di sisi lain, aspek lingkungan berfokus pada upaya konservasi alam dan pengendalian dampak negatif pariwisata agar aktivitas wisata tidak merusak daya dukung lingkungan (Bramwell et al., 2022).

Penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan desa wisata membantu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan

ekonomi dan pelestarian sumber daya lokal. Pendekatan ini juga dinilai mampu meningkatkan ketahanan desa wisata dalam menghadapi tekanan pasar dan perubahan lingkungan, sehingga pariwisata berkelanjutan menjadi prinsip fundamental dalam pengelolaan desa wisata jangka panjang (Lane & Kastenholz, 2023).

1.5.6 Mitigasi Bencana dalam Kawasan Wisata

Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perencanaan dan tindakan yang terstruktur (BNPB, 2021). Dalam konteks kawasan wisata, khususnya desa wisata yang banyak berkembang di wilayah pesisir, pegunungan, dan daerah rawan bencana, perencanaan mitigasi menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari pengelolaan destinasi wisata (Djalante et al., 2021).

Mitigasi bencana dalam pengembangan desa wisata mencakup perencanaan tata ruang yang memperhatikan risiko bencana, penyediaan infrastruktur pendukung evakuasi, serta pengembangan sistem peringatan dini yang dapat diakses oleh masyarakat dan wisatawan. Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata, karena ketiadaan mitigasi yang memadai dapat menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan bagi desa wisata (UNDRR, 2022).

Selain aspek teknis, peningkatan kapasitas masyarakat lokal merupakan elemen kunci dalam mitigasi bencana berbasis komunitas di desa wisata. Edukasi kebencanaan, pelatihan kesiapsiagaan, dan simulasi evakuasi berperan dalam meningkatkan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Pendekatan berbasis komunitas ini memperkuat ketahanan desa wisata terhadap risiko bencana dan mendukung keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata (BNPB, 2021).

1.5.7 Nilai Kearifan Lokal Bugis dalam Konsep Eppa Sulapa

Konsep *Eppa Sulapa* dalam nilai kearifan lokal Bugis merujuk pada empat nilai etika utama yang menjadi landasan perilaku sosial masyarakat, yaitu *macca* (cerdas), *malempu* (jujur), *warani* (berani), dan *getteng* (teguh atau tangguh) (Mattulada, 2015). Keempat nilai ini tidak dipahami sebagai konsep simbolik semata, melainkan sebagai pedoman moral yang mengatur sikap, keputusan, dan tindakan individu dalam kehidupan bermasyarakat (Pelras, 2006). *Eppa Sulapa* berfungsi sebagai sistem nilai yang menjaga kehormatan diri (*siri'*) dan harmoni sosial dalam masyarakat Bugis (Pelras, 2006).

Nilai *macca* mencerminkan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam berpikir serta bertindak, khususnya dalam mengambil keputusan yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan (Mattulada, 2015). Dalam konteks pengelolaan desa wisata, nilai *macca* menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengelola potensi wisata secara inovatif,

adaptif, dan berbasis pengetahuan lokal (Lane & Kastenholtz, 2023). Penerapan nilai *macca* mendorong pengelolaan desa wisata yang terencana dan berorientasi pada keberlanjutan (UNWTO, 2020).

Nilai *malempu* menekankan kejujuran, keterbukaan, dan integritas dalam hubungan sosial dan pengelolaan sumber daya bersama (Pelras, 2006). Dalam desa wisata, nilai *malempu* tercermin dalam transparansi pengelolaan keuangan, pembagian manfaat ekonomi yang adil, serta kepercayaan antara masyarakat dan pengelola wisata (Sidiq & Resnawaty, 2021). Kejujuran menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan wisatawan dan keberlanjutan kelembagaan desa wisata (Pratiwi & Kurniawan, 2024).

Nilai *warani* mencerminkan keberanian moral untuk mengambil keputusan, menghadapi tantangan, serta mempertahankan kepentingan bersama masyarakat (Mattulada, 2015). Dalam pengembangan desa wisata, nilai *warani* tercermin dalam keberanian masyarakat untuk berinovasi, menghadapi perubahan, dan menolak praktik pariwisata yang merusak lingkungan maupun nilai budaya lokal (Lane & Kastenholtz, 2023). Keberanian kolektif ini berperan penting dalam menjaga kedaulatan masyarakat lokal atas pengelolaan desa wisata (UNEP, 2021).

Nilai *getteng* menggambarkan keteguhan prinsip, konsistensi, dan ketangguhan dalam mempertahankan nilai dan komitmen sosial (Pelras, 2006). Dalam konteks desa wisata, nilai *getteng* berfungsi sebagai landasan untuk menjaga konsistensi pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan meskipun menghadapi tekanan ekonomi dan pasar (Bramwell et al., 2022). Keteguhan nilai *getteng* memperkuat daya tahan sosial dan kelembagaan desa wisata Bugis dalam jangka panjang (Lane & Kastenholtz, 2023).

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mixed method*, yaitu penggabungan metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan Program Sipatokkong serta dinamika pengelolaan Desa Wisata Mattabulu pascabencana melalui wawancara dengan informan kunci. Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan sebagai data pendukung untuk melihat perubahan tingkat pengetahuan peserta pelatihan melalui kuesioner *pre-test* dan *post-test*, serta perubahan jumlah kunjungan desa wisata dan peningkatan pendapatan BUMDes setelah pelaksanaan program.

Pendekatan penelitian ini berpijak pada model *Collaborative Governance* yang diposisikan sebagai mekanisme utama dalam pelaksanaan Program Sipatokkong. Proses kolaboratif tersebut melibatkan pemerintah desa, Pokdarwis, BUMDes, masyarakat, dan mitra pendamping dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat dengan nilai-nilai kearifan lokal Bugis Eppa Sulapa yang meliputi *Macca* (cerdas), *Malempu* (jujur), *Warani* (berani), dan *Getteng* (tangguh) sebagai landasan etis dan sosial yang memperkuat kolaborasi antaraktor di lapangan.

2.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wisata Mattabulu, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena Desa Wisata Mattabulu merupakan lokasi wisata yang terdapat di Kabupaten Soppeng yang pernah mendapatkan penghargaan nasional namun terdampak akibat kejadian bencana alam. Waktu penelitian berlangsung selama periode pelaksanaan Program Sipatokkong, yaitu pada Juli-November 2025, dengan rangkaian kegiatan pendampingan, pelatihan, dan penguatan kapasitas masyarakat di Desa Wisata Mattabulu. Proses penelitian dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Tahap persiapan
Meliputi pengurusan perizinan, pengumpulan dokumen dan observasi awal kondisi Desa Wisata Mattabulu pascabencana.
2. Tahap pelaksanaan
Mencakup pendampingan program Sipatokkong, observasi partisipatif terhadap aktivitas Pokdarwis dan masyarakat, pelaksanaan kegiatan pelatihan ekonomi hijau dan mitigasi bencana, serta pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner *pre-post test*.
3. Tahap analisis dan pelaporan
Berupa pengolahan data, interpretasi hasil, dan penyusunan laporan penelitian.

2.3 Fokus dan Subjek Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menggali secara mendalam bagaimana Program Sipatokkong berkontribusi terhadap penguatan tata kelola Desa

Wisata Mattabulu pascabencana, khususnya dalam penguatan ekonomi hijau, dan mitigasi bencana sebagai upaya mewujudkan pariwisata berkelanjutan melalui pendekatan *Collaborative Governance* yang diperkuat dengan nilai Eppa Sulapa. Penelitian ini menitikberatkan pada proses pendampingan, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta perubahan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa wisata.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan tingkat keterlibatan dan pemahaman terhadap pelaksanaan Program Sipatokkong. Dalam pendekatan kualitatif, informan dipilih dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan program, meliputi pengurus Pokdarwis, pengelola BUMDes, perangkat desa, serta masyarakat desa yang aktif dalam kegiatan ekonomi hijau dan mitigasi bencana.

Dalam pendekatan kuantitatif, subjek penelitian terdiri atas peserta pelatihan Program Sipatokkong yang mengikuti rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas, yaitu pelatihan mitigasi bencana (30 peserta), pelatihan promosi sadar wisata (21 peserta), dan pelatihan pengolahan produk lokal (80 peserta). Perbedaan jumlah peserta pada setiap jenis pelatihan disesuaikan dengan sasaran dan kebutuhan kegiatan. Kuesioner *pre-test* dan *post-test* digunakan untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan peserta pada masing-masing pelatihan secara terpisah, dan hasilnya dianalisis secara deskriptif sebagai data pendukung penelitian.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung selama pelaksanaan Program Sipatokkong untuk mengamati proses pendampingan, dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi hijau dan mitigasi bencana. Observasi bersifat partisipatif dan difokuskan pada aktivitas Pokdarwis, BUMDes, dan masyarakat desa.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap informan terpilih untuk menggali persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka terkait pelaksanaan program, bentuk kolaborasi yang terbangun, serta perubahan yang dirasakan setelah program dilaksanakan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar data yang diperoleh tetap fokus namun fleksibel.

3. Kuesioner (*Pre-test dan Post-test*)

Kuesioner digunakan sebagai data pendukung untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta sebelum dan sesudah pelatihan dalam Program Sipatokkong. Hasil *pre-test* dan *post-test* digunakan secara deskriptif untuk melihat kecenderungan peningkatan pengetahuan peserta.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen pendukung program,

seperti laporan kegiatan, modul pelatihan, notulen rapat, foto kegiatan, dan dokumen perencanaan desa wisata. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data hasil observasi dan wawancara.

2.5 Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang berperan sebagai perancang, pelaksana, penganalisis, dan penafsir data program Sipatokkong di Desa Mattabulu. Untuk mendukung proses tersebut, digunakan beberapa instrumen bantu berupa:

1. Catatan lapangan dan dokumentasi kegiatan, digunakan untuk merekam hasil pengamatan peneliti selama pelaksanaan Program Sipatokkong, termasuk proses pendampingan, dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi hijau dan mitigasi bencana.
2. Daftar hadir dan dokumentasi kegiatan, digunakan sebagai bukti keterlaksanaan program, meliputi lokakarya kelembagaan, pelatihan mitigasi bencana, pelatihan promosi sadar wisata, pelatihan pengolahan produk lokal, dan kegiatan relaunching desa wisata.
3. Kuesioner pra dan pascapelatihan (*pre-test* dan *post-test*), digunakan untuk mengukur perubahan tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta pada masing-masing jenis pelatihan dalam Program Sipatokkong. Keberhasilan pelatihan ditunjukkan oleh nilai rata-rata *post-test* $\geq 75\%$, yang merujuk pada prinsip ketuntasan kompetensi minimal dalam pendidikan dan pelatihan (Sudjana, 2016).
4. Checklist dokumen kelembagaan Pokdarwis, digunakan untuk menilai ketersediaan dan kelengkapan dokumen kelembagaan, seperti struktur organisasi, rencana kerja, dan dokumen pendukung tata kelola desa wisata.
5. Rekapitulasi data kunjungan wisatawan dan laporan keuangan BUMDes, digunakan untuk menilai perubahan jumlah kunjungan wisatawan serta peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat setelah pelaksanaan Program Sipatokkong.

Semua instrumen disusun berdasarkan prinsip fleksibilitas dan partisipatif, agar dapat menyesuaikan dengan konteks lapangan, karakteristik masyarakat Desa Mattabulu, serta kebutuhan evaluasi program berbasis *Collaborative Governance* yang diperkuat nilai Eppa Sulapa.

2.6 Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis interaktif Miles dan Huberman (1994). Analisis dimulai sejak proses pengumpulan data, dilakukan secara simultan, dan berlanjut hingga tahap penarikan kesimpulan akhir. Proses ini bertujuan untuk memahami makna dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan data pendukung lain terkait pelaksanaan program *SIPATOKKONG: Revitalisasi Kawasan Wisata Mattabulu melalui Collaborative Governance Eppa Sulapa terhadap Ekonomi Hijau dan Pariwisata Berkelanjutan Pasca Bencana*.

Langkah-langkah pengolahan dan analisis data meliputi:

1. Transkripsi Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi kelompok dengan masyarakat, Pokdarwis, dan aparat desa ditranskrip secara verbatim. Catatan lapangan hasil observasi kegiatan, seperti pelatihan, lokakarya, dan kegiatan *relaunching* Desa Wisata Mattabulu, disusun dalam bentuk narasi kronologis untuk memudahkan proses analisis berikutnya.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang telah terkumpul diseleksi dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan Pokdarwis, dan penerapan *Collaborative Governance Eppa Sulapa*. Proses reduksi dilakukan dengan menandai pernyataan penting, mengelompokkan ide pokok, dan memilih data yang menggambarkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pelaksanaan program.

3. Koding dan Kategorisasi Tema

Setelah reduksi, data dikoding untuk memberi label pada informasi yang memiliki makna serupa. Potongan data kemudian dikategorikan sesuai dengan jenis pelatihannya.

4. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah dikategorikan disajikan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel. Penyajian ini juga menampilkan perbandingan antara kondisi masyarakat sebelum dan sesudah program dilaksanakan untuk menunjukkan perubahan nyata.

5. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Setelah data disajikan, peneliti melakukan interpretasi terhadap makna di balik temuan lapangan. Kesimpulan yang diperoleh diverifikasi melalui proses triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan data kuantitatif (seperti hasil *pre-test* dan *post-test*, laporan keuangan BUMDes, serta data kunjungan wisatawan).

Melalui tahapan tersebut, diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan program *SIPATOKKONG* dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, memperkuat kelembagaan wisata, dan mendukung terwujudnya ekonomi hijau serta pariwisata berkelanjutan di Desa Mattabulu.

2.7 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan bentuk narasi deskriptif tematik. Data disajikan dalam bentuk angka yang menggambarkan tingkat pengetahuan, capaian program dan rakap kunjungan dan pendapatan BUMDes. Selain itu, data disajikan dalam bentuk uraian yang menggambarkan pengalaman, pandangan, dan partisipasi masyarakat Desa Mattabulu selama mengikuti program *SIPATOKKONG: Revitalisasi Kawasan Wisata Mattabulu melalui Collaborative Governance Eppa Sulapa terhadap Ekonomi Hijau dan Pariwisata Berkelanjutan Pasca Bencana*.

Setiap hasil lapangan dipaparkan secara terstruktur sesuai dengan fokus penelitian, yaitu:

1. Kondisi kelembagaan dan kapasitas masyarakat sebelum pelaksanaan program.
2. Proses implementasi program Sipatokkong di lapangan.
3. Hasil serta dampak program terhadap penguatan kapasitas masyarakat, ekonomi hijau, dan keberlanjutan pariwisata di Desa Mattabulu.

Dalam penyajian data, digunakan kutipan langsung dari hasil wawancara dengan masyarakat, aparat desa, Pokdarwis, dan pengelola BUMDes untuk mempertahankan keaslian makna yang disampaikan informan. Data juga dilengkapi dengan hasil observasi lapangan dan dokumentasi kegiatan seperti pelatihan, lokakarya, dan relaunching desa wisata untuk memperkuat validitas hasil penelitian.

Struktur penyajian data dalam penelitian ini mengikuti enam pilar utama program Sipatokkong, yaitu:

1. Sipatokkong RibitaraE (Bangkit dalam Kebijaksanaan)
Menampilkan data mengenai penguatan kelembagaan Pokdarwis melalui lokakarya keuangan, pembentukan ulang struktur organisasi, serta penyusunan rencana kerja yang terukur.
2. Sipatokkong RidecengngE (Bangkit dalam Kebaikan)
Memaparkan hasil pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pokdarwis.
3. Sipatokkong MarajaE (Bangkitkan Kejayaan)
Menyajikan data tentang proses pengaktifan kembali Desa Wisata Mattabulu melalui kegiatan *Relaunching*, rebranding “Jelling: *Journey along the Pearls of Indonesia*”, produksi konten promosi digital, dokumentasi sejarah lokal, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam promosi wisata.
4. Sipatokkong RitongengngE (Bangkit dalam Kebenaran)
Menggambarkan kegiatan revitalisasi kawasan wisata melalui penataan Lembah Cinta dan Air Terjun Liu PangiE, pemasangan papan informasi wisata, serta pembuatan jalur evakuasi dan titik kumpul bencana.
5. Sipatokkong RiminasaE (Bangkit dalam Harapan)
Menampilkan data mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan diversifikasi produk lokal seperti brownies crispy, dodol pangi, dan lilin aromaterapi berbasis bahan alami.
6. Sipatokkong RimatajangE (Bangkit dalam Kemuliaan)
Menggambarkan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko longsor di kawasan wisata.

Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika pelaksanaan program, perubahan yang terjadi di masyarakat, serta efektivitas pendekatan *Collaborative Governance* yang diperkuat dengan nilai Eppa Sulapa dalam mendorong kebangkitan ekonomi hijau dan keberlanjutan pariwisata di Desa Mattabulu pasca bencana.